

# **Analisis Pengaruh *Governance, Risk, And Compliance* Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016 - 2020**

## ***Analysis Of the Influence of Governance, Risk, And Compliance on Financial Performance Of Sharia Commercial Banks In Indonesia Period 2016 - 2020***

Michael Wahab Maulana<sup>1</sup>, Aldilla Iradianty<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Manajemen Bisnis Telekomunikasi Informatika, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, Indonesia  
michaelwm@student.telkomuniversity.ac.id

<sup>2</sup>Manajemen Bisnis Telekomunikasi Informatika, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, Indonesia  
aldillai@telkomuniversity.ac.id

### **Abstrak**

*Governance, Risk, and Compliance* merupakan perpaduan tiga pilar yang dikombinasikan untuk tujuan menyinkronkan informasi dan aktivitas di seluruh Bank Umum Syariah (BUS) beroperasi secara efektif, serta tidak terjadinya tumpang tindih informasi dan aktivitas yang tidak efektif. Kinerja BUS dapat diukur dengan *Return on Assets*, yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen BUS dalam mendapatkan keuntungan secara keseluruhan. Populasi yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 14 BUS yang terdapat di Indonesia pada tahun 2021. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling*, berdasarkan kriteria data penelitian yang ditetapkan adalah BUS yang ada di Indonesia periode 2016 - 2020, serta tidak melakukan *corporate action* dari tahun 2016. Teknik Analisis penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan *Eviews version 10*. Hasil penelitian ini menampilkan jika *Governance, Risk, and Compliance* secara simultan tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan pada BUS di Indonesia. Secara parsial hanya variabel *Risk* berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan, sebaliknya variabel *Governance* dan *Compliance* tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan pada BUS di Indonesia. Berdasarkan keterlibatan peneliti terhadap data, penelitian ini bersifat tidak mengintervensi data. Saran kepada peneliti selanjutnya, dapat menggunakan variabel yang lain. BUS disarankan mengelola risiko kredit yang dilakukan melalui pengawasan dari tahap permohonan pembiayaan, proses analisis pembiayaan, sampai proses pemantauan pembiayaan.

**Kata kunci:** *Governance, Risk, Compliance, ROA, Bank Umum Syariah*

### **Abstract**

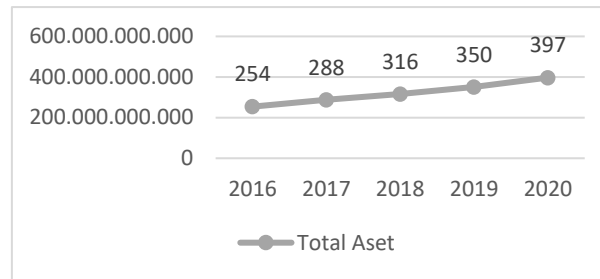
*Governance, Risk, and Compliance* is a combination of three pillars which are combined for the purpose of synchronizing information and activities throughout Islamic Commercial Banks (BUS) to operate effectively, and to avoid overlapping information and ineffective activities. BUS performance can be measured by *Return on Assets*, which is used to measure the ability of BUS management to gain overall profit. The population used in this study was 14 BUS located in Indonesia in 2021. The sampling method was carried out using *purposive sampling*, based on the research data criteria that were determined were BUS in Indonesia for the 2016 - 2020 period, and did not take *corporate action* from 2016. The analysis technique of this research uses panel data regression analysis with *Eviews version 10*. The results of this study show that *Governance, Risk, and Compliance* simultaneously have no effect on the Financial Performance of BUS in Indonesia. Partially, only the *Risk* has an effect on Financial Performance, on the other *Governance* and *Compliance* have no effect on the Financial Performance of BUS in Indonesia. Based on the researcher's involvement in the data, this research is not intervening with the data. Suggestions to further researchers, can use other variables. BUS is advised to manage credit risk which is carried out through supervision from the financing application stage, the financing analysis process, to the financing monitoring process.

**Keywords:** *Governance, Risk, Compliance, ROA, Islamic Commercial Banks*

### **I. PENDAHULUAN**

Indonesia adalah negara dengan sebagian besar penduduk Muslim, menjadikan Indonesia sebagai pasar yang potensial dalam peningkatan keuangan syariah. Berdasarkan (Badan Pusat Statistik, 2020)<sup>[3]</sup> data penduduk Indonesia menurut agamanya, Muslim berjumlah 207.176.162 jiwa dari jumlah 237.641.326 jiwa atau sebesar 87,18% yang menjadikan Indonesia mayoritas penduduk Muslim, hal ini dapat menjadi potensi atau peluang terhadap Bank Umum Syariah (BUS). Perkembangan BUS terus meningkat, jika dilihat dari jumlah BUS yang ada di Indonesia dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dan terus mengalami perubahan, pada tanggal 1 Februari 2021 terjadi *merger* dari tiga Bank Umum Syariah BUMN, yaitu PT. Bank BRI Syariah Tbk, PT. Bank

BNI Syariah, dan PT. Bank Syariah Mandiri, menjadi PT. Bank Syariah Indonesia Tbk, merger ini dilakukan dengan tujuan agar BUS dalam negeri untuk memiliki daya saing yang kuat (Kompasiana.com, 2021)<sup>[12]</sup> dan menjadi Bank Umum Syariah terbesar, serta menjadi *barometer market* di Indonesia dan mempunyai daya saing global (Investor.id, 2021)<sup>[11]</sup>.



Gambar 1.1 Perkembangan Total Aset Bank Umum Syariah 2016 - 2020 (Triliun Rupiah)

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, 2020

Berdasarkan Gambar 1.1 Indonesia mampu bersaing secara global karena dilihat dari total aset BUS saja sudah mencapai lebih dari Rp 397 triliun di tahun 2020, hal ini terjadi karena setiap tahunnya total aset BUS selalu mengalami peningkatan seperti yang kita lihat mulai dari tahun 2016 total aset BUS sebesar Rp 254 triliun, pada tahun 2017 naik menjadi Rp 288 triliun, pada tahun 2018 menjadi Rp 316 triliun, dan pada tahun 2019 menjadi Rp 350 triliun. Hal ini mempertegas bahwa total aset BUS yang selalu meningkat, menjadikan semakin diminati sebagai lembaga keuangan terpercaya. Perkembangan BUS dapat dilihat dari bermacam aspek, salah satunya dapat dilihat dari Kinerja Keuangan. Kinerja keuangan suatu BUS dari tahun ke tahun dapat dilihat pada laporan keuangan tepatnya pada rasio profitabilitas yaitu *Return on Assets* (ROA), sebagai komponen kinerja keuangan, ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Sesuai pendapat Yantiningsih (2016)<sup>[21]</sup> menyatakan bahwa semakin besar ROA suatu BUS, akan semakin besar juga tingkat keuntungan yang dicapai BUS tersebut dan semakin baik posisi BUS dari segi penggunaan aset. Oleh karena itu diperlukan implementasi *Governance* agar tingkat keuntungan dan penggunaan aset semakin baik untuk kedepannya agar tidak terjadi penyalahgunaan keuntungan berdasarkan posisi pada perusahaan.

Penerapan prinsip *Governance* dalam dunia bisnis di Indonesia merupakan tuntutan agar BUS yang ada tidak tertindas oleh persaingan global yang semakin keras. Prinsip dasar dari *Governance* pada dasarnya memiliki tujuan untuk memberikan kemajuan kinerja suatu BUS (Purwani, 2010)<sup>[14]</sup>. Penerapan *Governance* merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis yang dapat membantu terciptanya hubungan yang kondusif dan dapat dipertanggungjawabkan diantara elemen dalam BUS (Dewan Komisaris, Dewan Komisari Independen dan para pemegang saham) dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan. Dewan Komisaris Independen mempunyai peran menjamin transparansi dan keterbukaan laporan keuangan BUS. Adanya Dewan Komisaris Independen, maka kepentingan pemegang saham baik mayoritas maupun minoritas tidak diabaikan, karena Dewan Komisaris Independen lebih bersikap netral terhadap keputusan yang dibuat oleh manajer (Puspitasari & Ernawati, 2010)<sup>[15]</sup>.

Pada perkembangan *Governance* terdapat komponen penting yang harus dikembangkan secara efisien dalam suatu BUS agar pelaksanaan *Governance* yang baik dapat berjalan dengan lebih baik, salah satunya adalah manajemen risiko (*Risk*). Manajemen Risiko (*Risk*) adalah pendekatan yang terorganisir untuk menangani ketidakpastian pengelolaan tersebut terdapat pengidentifikasi risiko, pengukuran risiko, pemetaan risiko, pengelolaan risiko, *monitoring* dan pengendalian risiko. Tujuan dari pelaksanaan *Governance* dan *Risk* merupakan salah satu bentuk komitmen BUS dalam menyepakati regulasi yang dibuat oleh regulator. Dalam menjalankan tugasnya, BUS dituntut untuk menjaga dan meningkatkan tingkat kesehatan BUS dengan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan bisnisnya. Ini merupakan bentuk regulasi yang harus dipatuhi dan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. (Anastasya & Novita, 2019)<sup>[2]</sup>. Kepatuhan (*Compliance*) terhadap kebijakan dan prosedur perusahaan, peraturan perundang undangan, tata kelola yang kuat dan efisien, dan juga pengelolaan *Risk* yang baik dianggap sebagai kunci untuk kesuksesan organisasi. Hal ini dapat dicapai jika organisasi telah memenuhi prasyarat tugas dan kewajiban terhadap undang – undang, peraturan, kontrak, strategi dan kebijakan, dan juga memastikan bahwa organisasi memiliki proses dan pengendalian internal untuk memenuhi persyaratan yang diberlakukan oleh badan pemerintah, pengatur, dan kebijakan internal (Gunawan, 2021)<sup>[8]</sup>. Pada BUS sering disebut Kepatuhan Syariah (*Shariah Compliance*), adalah ketaatan BUS terhadap prinsip - prinsip syariah yang meliputi prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adllwa tazawunn*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*). (Widialoka, Hidayat, & Azib, 2016)<sup>[20]</sup>.

*Governance, Risk and Compliacne* (GRC) merupakan gabungan tiga pilar yang bekerja sama untuk tujuan menyinkronkan informasi serta aktivitas di seluruh BUS agar beroperasi secara lebih efektif, memungkinkan berbagi informasi yang efisien, melaporkan aktivitas secara lebih dan menghindari tumpang tindih yang tidak efektif. Pada penerapan ketiga konsep GRC menjadi konsep yang tidak dapat dipisahkan dan saling

berkesinambungan. Penerapan yang tidak terintegrasi bisa memunculkan koordinasi yang lemah, serta memunculkan pengelolaan biaya yang tidak efektif dan dapat mempengaruhi kinerja BUS. Sebaliknya, apabila penerapannya terintegrasi dapat jadi solusi untuk BUS dalam menghadapi kondisi pelemahan di berbagai sektor industri serta komoditas yang lain sebagai pendukung perekonomian nasional serta meningkatkan kinerja BUS. Pada awal tahun 2014, Otoritas Jasa Keuangan meluncurkan “*Roadmap Tata Kelola Perusahaan Indonesia: Menuju Emiten dan Perusahaan Publik Yang Lebih Baik*” dan mewajibkan GRC yang terintegrasi untuk industri keuangan. Fungsi GRC mengharuskan suatu BUS berinovasi untuk mengubah kewajiban regulasi, GRC menjadi peluang strategis. Secara spesifik, suatu BUS berupaya untuk mengintegrasikan *strategi, goals and objectives* korporat dengan fungsi GRC serta menanamkan dalam *bussines process* utama yang harus selaras dengan visi dan misi BUS. Dengan demikian, tanpa GRC yang terintegrasi, penerapannya tidak akan dapat memberikan nilai tambah secara optimal (Gunawan, 2021)<sup>[8]</sup>. Beberapa tahun terakhir GRC menjadi pusat perhatian BUS dalam implementasi di bidang tata kelola, hal ini menjadi alasan adanya penghargaan TOP GRC yang merupakan kegiatan *corporate* tahunan. TOP GRC Awards merupakan satu rangkaian dari GRC Summit, yang ditujukan untuk mendorong BUS di Indonesia untuk meningkatkan implementasi GRC, supaya kinerja berkembang secara berkelanjutan didasari penerapan prinsip GRC, dengan tujuan untuk mendorong peningkatan bisnis BUS yang berkelanjutan melalui pengembangan kebijakan serta implementasi GRC terhadap regulasi secara terintegrasi. Beberapa tindakan dalam penerapan GRC antara lain: ketaatan terhadap prinsip kehati-hatian, pelaksanaan *Governance*, dan pengawasan yang efisien dari Otoritas Pengawas Bank. Pada GRC Summit 2019 BUS yang mendapatkan penghargaan GRC Awards, yaitu, Bank BCA Syariah. (Upperline, 2019)<sup>[18]</sup>.

## II. TINJAUAN LITERATUR

### A. Governance

*Governance* menurut *The Indonesian Institute for Corporate Governance* sebagai struktur dan proses yang diimplementasikan dalam melaksanakan serta mengelola Bank Umum Syariah (BUS) guna meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka waktu yang panjang dengan tetap mempertimbangkan kepentingan *stakeholder* yang lain (Hamdani, 2016)<sup>[9]</sup>. Peraturan Bank Indonesia No 11/3/PBI/2009 tentang BUS, Dewan Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak mempunyai hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham serta/ ataupun hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris yang lain, direksi serta/ ataupun pemegang saham pengendali ataupun hubungan dengan BUS, yang sanggup mempengaruhi kemampuannya untuk berperan independen.

### B. Risk

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum, *Risk* merupakan serangkaian proses serta metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, serta mengendalikan risiko yang muncul dari kegiatan usaha Bank Umum Syariah (BUS). Risiko Kredit merupakan risiko akibat kegagalan nasabah ataupun pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada BUS sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Indikator yang digunakan dalam mengukur tingkat risiko kredit adalah NPL (*Non-Performing Loan*), NPL adalah rasio yang membuktikan kemampuan manajemen BUS dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh BUS dengan tingkat rasio NPL mempunyai batas maksimum 5 persen, hal ini sesuai dengan (Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/11/PBI/2015).

$$NPL : \frac{\text{Jumlah Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

### C. Compliance

*Compliance* dalam arti luas merupakan mengikuti suatu spesifikasi, standar ataupun hukum yang sudah diatur dengan jelas yang umumnya diterbitkan oleh lembaga ataupun organisasi yang berwenang dalam suatu bidang tertentu. *Compliance* merupakan ketaatan kepada perintah serta peraturan terhadap pihak berwenang, sebaliknya *Compliance* merupakan ketaatan Bank Umum Syariah (BUS) pada prinsip - prinsip syariah serta tetap patuh pada peraturan yang sudah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Umum Indonesia (DSN - MUI). Pada praktiknya tidak semua BUS mampu berkinerja baik sesuai dengan praktik bisnis, prinsip syariah dan *Compliance* yang ditetapkan. Oleh karena itu penunjukkan Dewan Pengawas Syariah guna untuk memastikan kegiatan usaha dan kepatuhan telah sesuai dengan prinsip - prinsip syariah yang ditetapkan secara maksimal.

### III. METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Pengaruh *Governance* Terhadap Kinerja Keuangan

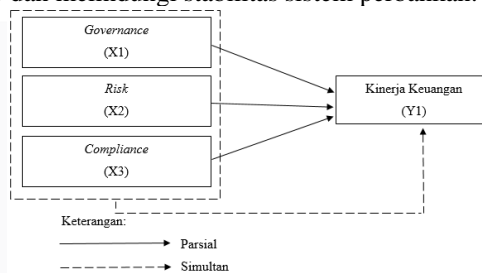
Perihal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurcahyani (2013)<sup>[13]</sup>, menunjukkan jika *Governance* berpengaruh terhadap ROA, hal ini menunjukkan bahwa Bank Umum Syariah (BUS) yang menerapkan *Governance* dengan baik sanggup memberikan keuntungan kepada BUS dengan memanfaatkan aktiva yang dikeluarkan, sehingga dapat meningkatkan kinerja BUS. Pada penelitian ini peneliti mengukur *Governance* terhadap Kinerja Perusahaan yang diprosikan menggunakan anggota Dewan Komisaris Independen, dikarenakan Dewan Komisaris Independen sebagai dewan yang tidak memiliki hubungan apapun kepada pihak BUS yang memiliki peran pengawasan untuk mengurangi konflik keagenan dan meningkatkan kinerja.

#### B. Pengaruh *Risk* Terhadap Kinerja Keuangan

Pelaksanaan *Risk* pada lembaga perbankan itu berbeda (Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah), pelaksanaan *Risk* tersebut disesuaikan dengan tujuan BUS, kebijakan usaha, ukuran, kompleksitas usaha (jenis transaksi produk atau jasa dan jaringan usaha) serta kemampuan BUS (kemampuan keuangan, infrastruktur pendukung, dan sumber daya manusia). Pelaksanaan *Risk* yang baik dapat memberikan dampak pada kinerja keuangan BUS, sehingga meningkatkan kinerja BUS yang berakibat pada pencapaian tujuan yang sesuai dengan apa yang diharapkan perusahaan.

#### C. Pengaruh *Compliance* Terhadap Kinerja Keuangan

Pada pelaksanaan *Compliance* pada Bank Umum Syariah (BUS), penunjukkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk mengawasi pelaksanaan fatwa DSN di lapangan dilakukan oleh DSN - MUI merupakan langkah guna memastikan kegiatan usaha serta *Compliance* telah sesuai dengan prinsip - prinsip syariah secara optimal. Perihal ini sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No 11/3/PBI/2009 tentang BUS dan Surat Edaran Bank Indonesia No 8/19/DPbS/2006 tentang tugas, wewenang dan tanggung jawab DPS. Kaitannya dengan Kinerja Keuangan, selaku lembaga keuangan berbasis syariah yang mempunyai tingkatan risiko yang kompleks, BUS perlu memperhatikan tingkat *Compliance* terhadap prinsip - prinsip syariah, peraturan - peraturan ataupun regulasi yang ditetapkan oleh BI, DSN - MUI, serta OJK, dengan tujuan melindungi tingkat kesehatan keuangan serta BUS dan melindungi stabilitas sistem perbankan.



#### D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan Teori dan Kerangka Pemikiran yang telah dijelaskan maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H1 : *Governance, Risk, and Compliance* secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah periode 2016 - 2020

H2 : *Governance* secara parsialberpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah periode 2016 - 2020

H3 : *Risk* secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah periode 2016 - 2020

H4 : *Compliance* secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah periode 2016 - 2020

### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Populasi dan Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang ada Indonesia periode 2016 - 2020. Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 14 Bank Umum Syariah. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dan menghasilkan 8 sampel dengan periode penelitian selama 5 tahun, maka jumlah data dalam penelitian sebanyak 40 sampel penelitian.

#### B. Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif, analisis regresi data panel, dan pengujian hipotesis. Data panel merupakan penggabungan data *time series* dengan *cross section*.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y : Kinerja Keuangan

$\alpha$  : Konstanta

- X1 : *Governance*  
 X2 : *Risk*  
 X3 : *Compliance*  
 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$  : Koefisien Regresi masing - masing variabel independen  
 $\varepsilon$  : Error Term

Model regresi data panel diseleksi dengan pengujian sebagai berikut:

- Uji *Chow*  
 Pengujian untuk menentukan *Common Effect Model* atau *Fixed Effect Model* yang lebih baik digunakan
- Uji *Hausman*  
 Pengujian untuk menentukan *Fixed Effect Model* atau *Random Effect Model* yang lebih baik digunakan
- Uji *Lagrange Multiplier*  
 Pengujian untuk menentukan *Common Effect Model* atau *Random Effect Model* yang lebih baik digunakan

### C. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif bertujuan menjelaskan deskripsi data dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian. Deskripsi data tersebut meliputi jumlah data, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*) dan standar deviasi dari setiap variabel. Hasil uji statistik deskriptif sebagai berikut:

Tabel 3.1 Hasil Statistik Deskriptif

	Kinerja Keuangan	<i>Governance</i>	<i>Risk</i>	<i>Compliance</i>
<i>Mean</i>	1.12	2.25	4.45	2.25
<i>Minimum</i>	-10.77	2.00	0.30	2.00
<i>Maximum</i>	13.60	3.00	22.04	3.00
<i>Std. Deviasi</i>	4.49	0.44	4.37	0.44

Kinerja Keuangan adalah variabel dependen dalam penelitian ini diukur menggunakan ROA. Rata - rata kinerja keuangan sebesar 1.12 nilai minimum sebesar -10.77 dimiliki oleh PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk di tahun 2017, sedangkan nilai maksimum sebesar 13.60 diperoleh dari PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk di tahun 2019, dan standar deviasi sebesar 4.49 dengan demikian penyimpangan data kinerja keuangan cukup rendah.

Perolehan nilai variabel *Governance* berdasarkan data yang terlampir memiliki nilai maksimum dengan besaran 3.00 dimiliki oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk dan PT. Bank Mega Syariah di tahun 2017, sedangkan nilai minimum dengan besaran 2.00 dimiliki oleh PT. Bank Jabar Banten Syariah, PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk, PT. Bank Syariah Bukopin, PT. Bank Central Asia Syariah, PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk, serta PT. Bank Victoria Syariah di tahun 2016, dengan perolehan nilai standar deviasi sebesar 0.44 sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa penyimpangan data *Governance* cukup rendah.

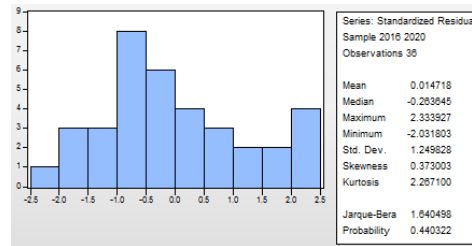
Perolehan nilai variabel *Risk* berdasarkan data terlampir memiliki nilai rata-rata nilai *Risk* sebesar 4.45, nilai minimum sebesar 0.30 diperoleh dari PT. Bank Central Asia Syariah di tahun 2017 sedangkan nilai maksimum sebesar 22.04 dimiliki oleh PT. Bank Jabar Banten Syariah di tahun 2017 dan standar deviasi sebesar 4.37 dengan demikian penyimpangan data *Risk* cukup rendah.

Perolehan nilai variabel *Compliance* berdasarkan data yang terlampir memiliki nilai maksimum dengan besaran 3.00 dimiliki oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk di tahun 2016 dan PT. Bank Jabar Banten Syariah di tahun 2016, sedangkan nilai minimum dengan besaran 2.00 dimiliki oleh PT. Bank Mega Syariah, PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk, PT. Bank Bukopin Syariah, PT. Bank Central Asia Syariah, PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk, dan PT. Bank Victoria Syariah di tahun 2016, dengan perolehan nilai standar deviasi sebesar 0.44 sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa penyimpangan data *Compliance* cukup rendah.

### D. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik atas persamaan regresi berganda yang digunakan.

1. Uji Normalitas



Gambar 3.1 Hasil Uji Normalitas Dengan Log Natural

Berdasarkan hasil pengujian yang ditunjukkan oleh Gambar 3.1, diketahui bahwa *probability* signifikan lebih besar dari 0.05. Hal ini disebabkan data yang digunakan untuk uji normalitas pada Gambar 3.1 sudah melalui metode *Log Natural*. Sehingga hasil uji normalitas sesuai dengan kriteria pengujian yang telah dijabarkan terlihat bahwa hasil dari uji menunjukkan *probability* sebesar  $0.440322 > 0.05$  maka dapat diambil kesimpulan residual berdistribusi normal, dan uji normalitas terpenuhi.

## 2. Uji Multikolinearitas

Correlation			
	Governance	Risk	Compliance
Governance	1.000000	0.041538	0.200000
Risk	0.041538	1.000000	0.341843
Compliance	0.200000	0.341843	1.000000

Gambar 3.2 Hasil Pengujian Uji Multikolinearitas

Berdasarkan hasil pengujian uji multikolinearitas pada Tabel 3.2 dapat diketahui bahwa tidak ada variabel bebas yang nilai korelasinya lebih dari 0.90 yang artinya tidak ada korelasi antar variabel bebas. Maka dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini tidak terdapat multikolinearitas antar variabel bebas.

## 3. Uji Heteroskedastisitas

Apabila model terbaik yang terpilih adalah *Random Effect Model* maka uji heteroskedastisitas tidak perlu dilakukan. Hal ini dikarena pada *Random Effect Model* menggunakan metode *Generalized Least Square* (GLS) yang pada intinya memberikan pembobotan pada kepada variasi data, sehingga dengan menggunakan GLS dan model yang terpilih adalah *Random Effect Model* maka masalah heteroskedastisitas dapat diatasi (Gujarati & Porter, 2009)<sup>[7]</sup>. Pada uji pemilihan model, model yang terpilih adalah *Random Effect Model* maka dari itu, untuk uji heteroskedastisitas tidak lakukan.

## 4. Uji Autokorelasi

Apabila terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi, model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi (Ghozali, 2013)<sup>[6]</sup>. Untuk mendeteksi gejala autokorelasi dapat dilakukan dengan pengujian *Durbin-Watson* (d). Hasil dari pengujian *Durbin-Watson* (d) dibandingkan dengan nilai dtabel pada  $\alpha = 0.05$ . Tabel *Durbin-Watson* memiliki nilai batas atas (dU) dan nilai batas bawah (dL) untuk berbagai nilai n dan k. Berdasarkan hasil uji autokorelasi dengan *Durbin-Watson* (d) bahwa nilai *Durbin-Watson<sub>statistik</sub>* (d) sebesar 1.699324. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa uji autokorelasi pada penelitian ini tidak terjadi autokorelasi, hal ini sesuai dengan syarat uji autokorelasi  $dU < d < 4 - dU$  yang artinya tidak terjadi autokorelasi.

## E. Pemilihan Metode Estimasi Regresi Data Panel

### 1. Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	21.964406	(7,29)	0.0000
Cross-section Chi-square	73.633115	7	0.0000

Gambar 3.3 Hasil Uji Chow

Berdasarkan hasil pengujian yang ditunjukkan oleh Gambar 3.3, diketahui bahwa nilai Probabilitas dari *Cross-section F* dapat dilihat bahwa nilainya sebesar 0,0000 atau lebih kecil dibandingkan dengan taraf signifikansi penelitian yaitu sebesar 0.05 sehingga disimpulkan berdasarkan Uji *Chow* bahwa model yang lebih baik digunakan pada penelitian ini adalah *Fixed Effect Model*.

### 2. Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	1.467757	3	0.6897

Gambar 3.4 Hasil Uji Hausman

Berdasarkan Gambar 3.4 nilai Probabilitas dari *Cross-section Random* dapat dilihat bahwa nilainya sebesar 0.6897 atau lebih besar dibandingkan dengan taraf signifikansi penelitian yaitu sebesar 0.05 sehingga disimpulkan berdasarkan Uji *Hausman* bahwa model yang lebih baik digunakan pada penelitian ini adalah *Random Effect Model*.

#### Uji *Lagrange Multiplier*

Null (no rand. effect) Alternative	Cross-section One-sided	Period One-sided	Both
Breusch-Pagan	45.44534 (0.0000)	2.431307 (0.1189)	47.87665 (0.0000)

Gambar 3.5 Hasil Uji *Lagrange Multiplier*

Berdasarkan Gambar 3.5 pengujian uji *Lagrange Multiplier* diperoleh nilai signifikansi *Breusch-Pagan* sebesar 0.0000 atau lebih kecil dari 0.05 sehingga model terbaik yang dipilih adalah *Random Effect Model*.

#### F. Persamaan Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.520947	1.618188	0.939907	0.3543
X1	-0.691845	0.449541	-1.539005	0.1336
X2	-0.523639	0.144802	-3.616246	0.0010
X3	0.425518	0.366557	1.160852	0.2543

Gambar 3.6 Hasil Pengujian *Random Effect Model*

Berdasarkan hasil pengujian yang ditunjukkan oleh Gambar 3.6, maka persamaan regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$\text{Kinerja Keuangan} = 1.520947 - 0.691845\text{Governance} - 0.523639\text{Risk} + 0.425518\text{Compliance}$$

Dari persamaan regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Nilai Konstanta sebesar 1.520947. Artinya, apabila *Governance*, *Risk* and *Compliance* dianggap konstan atau sama dengan nol, maka Kinerja Keuangan sebesar 1.520947.
- Koefisien dari *Governance* memiliki nilai koefisien regresi negatif sebesar -0.691845. Artinya, nilai koefisien regresi variabel lainnya tetap (tidak berubah), maka penambahan variabel *Governance* sebesar 1 akan mengurangi nilai Kinerja Keuangan sebesar -0.691845.
- Koefisien *Risk* memiliki nilai koefisien regresi negatif sebesar -0.523639. Artinya, nilai koefisien regresi variabel lainnya tetap (tidak berubah), maka penambahan variabel *Risk* sebesar 1 akan mengurangi nilai Kinerja Keuangan sebesar -0.523639.
- Koefisien dari *Compliance* memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0.425518. Artinya, nilai koefisien regresi variabel lainnya tetap (tidak berubah), maka penambahan variabel *Compliance* sebesar 1 akan menambah nilai Kinerja Keuangan sebesar 0.425518.

#### G. Pengujian Hipotesis

##### Uji Simultan (*F Test*)

Weighted Statistics		
F-statistic	5.766116	Prob(F-statistic) 0.002859

Gambar 3.7 Hasil Uji Simultan (*F Test*)

Berdasarkan hasil uji F yang disajikan dalam Gambar 3.7 diatas diperoleh nilai F hitung sebesar 5.76 dan F tabel sebesar 6.59, maka  $F \text{ hitung } 5.76 < F \text{ tabel } 6.59$  artinya Hipotesis ditolak atau  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak dengan kata lain *Governance*, *Risk*, and *Compliance* secara simultan tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan.

##### Uji Parsial (*T Test*)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.520947	1.618188	0.939907	0.3543
<i>Governance</i>	-0.691845	0.449541	-1.539005	0.1336
<i>Risk</i>	-0.523639	0.144802	-3.616246	0.0010
<i>Compliance</i>	0.425518	0.366557	1.160852	0.2543

Gambar 3.8 Hasil Uji Parsial (*T Test*)

Berdasarkan nilai uji T yang di peroleh secara parsial pengaruh variabel independen terhadap Kinerja Keuangan bahwa *Governance* diperoleh nilai t hitung sebesar 1.5390. Nilai t hitung  $1.5390 < t \text{ tabel } 2.7764$ ,

maka hipotesis ditolak atau  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, dengan kata lain berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa pergerakan nilai *Governance* secara parsial tidak mempengaruhi nilai Kinerja Keuangan. *Risk* diperoleh nilai  $t$  hitung sebesar 3.6162. Nilai  $t$  hitung 3.6162 >  $t$  tabel 2.7764, maka hipotesis diterima atau  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, dengan kata lain berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa pergerakan nilai *Risk* secara parsial mempengaruhi nilai Kinerja Keuangan. Semakin tinggi rasio *Risk* maka akan menurunkan tingkat Kinerja Keuangan, begitupun sebaliknya jika semakin rendah nilai *Risk* maka tingkat Kinerja Keuangan akan meningkat. *Compliance* diperoleh nilai  $t$  hitung sebesar 1.1608. Nilai  $t$  hitung 1.1608 <  $t$  tabel 2.7764 maka hipotesis ditolak atau  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, dengan kata lain berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa pergerakan nilai *Compliance* secara parsial tidak mempengaruhi nilai Kinerja Keuangan.

#### Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Weighted Statistics			
R-squared	0.350891	Adjusted R-squared	0.290037

Gambar 3.9 Hasil Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Berdasarkan Gambar 3.9 diketahui bahwa nilai *Adjusted R-Squared* sebesar 0.2900. Nilai tersebut dapat diinterpretasikan bahwa *Governance*, *Risk*, dan *Compliance* secara bersama-sama mampu mempengaruhi dan menjelaskan Kinerja Keuangan sebesar 29% dan sisanya sebesar 71% dipengaruhi oleh faktor - faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

#### H. Pembahasan Penelitian

##### **Pengaruh *Governance*, *Risk* and *Compliance* secara simultan terhadap Kinerja Keuangan**

Berdasarkan hasil dari Uji Simultan ( $F$  test) yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa *Governance*, *Risk* and *Compliance* tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah periode 2016-2020. Berdasarkan Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) secara bersama-sama *Governance*, *Risk*, dan *Compliance* tidak mampu mempengaruhi dan menjelaskan Kinerja Keuangan sebesar 29% dan sisanya sebesar 71% dipengaruhi oleh faktor - faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anastasya & Novita (2019) yang menyatakan bahwa ketiga konsep yakni *Governance*, *Risk* and *Compliance* secara simultan tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kinerja perusahaan.

##### **Pengaruh *Governance* terhadap Kinerja Keuangan**

Berdasarkan hasil Uji Parsial ( $T$  test) yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara *Governance* dengan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah periode 2016-2020. Dengan kata lain pergerakan nilai *Governance* secara parsial tidak mempengaruhi nilai Kinerja Keuangan dan juga penambahan atau pengurangan besarnya jumlah Dewan Komisaris Independen belum tentu dapat memaksimalkan kinerja keuangan perusahaan. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wehdawati (2015)<sup>[19]</sup> dan Eksandy (2018)<sup>[5]</sup> yang menyatakan bahwa proporsi *Governance* tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan. Akan tetapi hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Badawi (2018)<sup>[4]</sup> yang menyatakan bahwa *Governance* berpengaruh dengan Kinerja Keuangan.

##### **Pengaruh *Risk* terhadap Kinerja Keuangan**

Berdasarkan hasil Uji Parsial ( $T$  test) yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara *Risk* dengan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah periode 2016-2020. Dengan kata lain pergerakan nilai *Risk* secara parsial mempengaruhi nilai Kinerja Keuangan, Jika nilai rasio *Risk* meningkat maka tingkat Kinerja Keuangan akan menurun, begitupun sebaliknya jika nilai rasio *Risk* menurun maka tingkat Kinerja Keuangan akan meningkat. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Sudarno (2017)<sup>[17]</sup> yang menyatakan bahwa *Risk* berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan. Akan tetapi hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdurrohman et al (2020)<sup>[1]</sup> yang menyatakan bahwa *Risk* tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan.



### Pengaruh *Compliance* terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan hasil Uji Parsial (*T test*) yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara *Compliance* dengan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah periode 2016-2020. Dengan kata lain pergerakan nilai *Compliance* secara parsial tidak mempengaruhi nilai Kinerja Keuangan dan juga penambahan atau pengurangan besarnya jumlah pengawasan DPS belum tentu dapat memaksimalkan kinerja keuangan perusahaan. Tugas dan wewenang dari DPS sebagai tolak ukur penilaian *Compliance* juga tidak ikut andil secara langsung ke dalam operasional perbankan, dikarenakan DPS merupakan lembaga eksternal bagi BUS yang hanya bertugas mengawasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Eksandy (2018)<sup>[5]</sup> dan Rahman & Bukair (2013)<sup>[16]</sup> yang menunjukkan bahwa DPS tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan. Akan tetapi hasil ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hartika (2017)<sup>[10]</sup> yang menunjukkan bahwa DPS berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan, yang menyatakan bahwa semakin besar jumlah anggota DPS maka akan meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan BUS yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga tidak terjadi penggunaan dana yang tidak berprinsip syariah yang dapat mengurangi Kinerja Keuangan.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Pengaruh *Governance, Risk and Compliance* Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia, maka penelitian ini menyimpulkan hasil sebagai berikut:

1. *Governance, Risk, and Compliance* secara simultan tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016 - 2020.
2. *Governance* secara parsial tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016 - 2020.
3. *Risk* secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016 - 2020.
4. *Compliance* secara parsial tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016 - 2020.

### Saran

Berdasarkan pada hasil analisis serta kesimpulan yang telah disampaikan maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya variabel *Governance, Risk, and Compliance* yang digunakan tidak hanya menggunakan Komisaris Independen, *Non-Performing Loan*, dan Dewan Pengawas Syariah saja. Dapat menggunakan variabel lainnya seperti Dewan Direksi, Dewan Komisaris, dan *Loan to Deposit Ratio*. Selain itu, menggunakan waktu periode yang lebih lama dan lebih update sehingga pengambilan keputusan lebih tepat, mendapatkan kelengkapan data yang akurat dan objek pada penelitian selanjutnya tidak hanya Bank Umum Syariah tetapi perusahaan lainnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), karena perusahaan - perusahaan yang terdaftar di BEI menerapkan *Governance, Risk, and Compliance*.
2. Saran untuk Bank Umum Syariah di Indonesia diharapkan dapat memperhatikan variabel yang berpengaruh yaitu variabel Risk guna meningkatkan Kinerja Keuangan dengan cara BUS wajib memantau penggunaan kredit dan kemampuan serta kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajibannya sesudah kredit diberikan dan juga menerapkan *Risk* secara konsisten dan lebih baik untuk menekan nilai NPL, karena jika rasio NPL tinggi akan menyebabkan kesehatan suatu BUS tidak sehat dan mengindikasikan kurang mampu dalam mengendalikan kredit macet.

## REFERENSI

- [1] Abdurrohman, Fitrianiingsih, D., Salam, A. F., & Putri, Y. (2020 ). Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Loan To Deposit Ratio* (LDR) Dan *Non Performing Loan* (NPL) Terhadap *Return On Asset* (ROA) Pada Sektor Perbankan Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Revenue*.
- [2] Anastasya, D., & Novita. (2019). Pengaruh Penerapan *Governance, Risk, and Compliance* Terhadap Kinerja Perusahaan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia*, 1-16.
- [3] Badan Pusat Statistik. (2020). Badan Pusat Statistik Sensus Penduduk 2020.
- [4] Badawi, A. (2018). Pengaruh *Good Corporate Governance* Dan *Intellectual Capital* Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pada Perbankan Indonesia (Studi Empiris Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017). *Jurnal JDM*.
- [5] Eksandy, A. (2018). Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perbankan Syariah Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 1-10.
- [6] Ghozali, I. (2013). Analisis *Multivariat* Dan *Ekonometrika: Teori, Konsep, Dan Aplikasi Dengan Eviews* 8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- [7] Gujarati, D., & Porter, D. (2009). Dasar - dasar *Ekonometrika* (Terjemahan). Jakarta: Salemba Empat.
- [8] Gunawan, R. M. (2021). *GRC (Governance, Risk, and Compliance)* Depok: Rajawali Press.

- [9] Hamdani. (2016). *Good Corporate Governance: Tinjauan Etika Dalam Praktik Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- [10] Hartika, H. Y. (2017). Pengaruh Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Indonesia . *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Islam* .
- [11] Investor.id. (2021, Februari 17). <https://investor.id/finance/hery-gunardi-bsi-solusi-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia>
- [12] Kompasiana.com. (2021, April 18). <https://www.kompasiana.com/muhammad95462/607c00c1d541df59a405a742/kenapa-bank-syariah-indonesia-dibentuk>
- [13] Nurcahyani. (2013). Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Pada Perusahaan Peserta CGPI Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2009-2011). *Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya*.
- [14] Purwani, T. (2010). Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Kinerja Perusahaan Semarang: *Majalah Ilmiah Informatika*.
- [15] Puspitasari, F., & Ernawati, E. (2010). Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan Badan Usaha. *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan*.
- [16] Rahman, A. A., & Bukair, A. A. (2013). *The Influence of the Shariah Supervision Board on Corporate Social Responsibility Disclosure by Islamic Banks of Gulf Co-Operation Council Countries*. *Asian Journal of Business and Accounting*.
- [17] Sudarno. (2017). Analisis Pengaruh *Non Performing Loan* (NPL) dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) Terhadap *Return on Asset* (ROA) Pada Bank Perkreditan Rakyat di Provinsi Riau. Riau: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Indonesia .
- [18] Upperline. (2019, August 22). Upperline Media Korporasi Indonesia. <https://upperline.id/post/50-perusahaan-raih-penghargaan-top-grc-2019>
- [19] Wehdawati. (2015). Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Tahun 2010-2012. *Jurnal Wawasan Manajemen*.
- [20] Widialoka, W., Hidayat, A. R., & Azib. (2016). Analisis Pengaruh Kepatuhan Syariah (*Shariah Compliance*) terhadap Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2010 - 2015. *Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah* , 672 - 678.
- [21] Yantiningih, N. D. (2016). Pengaruh Kualitas Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Indonesia (Periode 2010-2014). *Jurnal Magister Akuntansi* , 79-89.